

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan; dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Batanghari. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Batanghari dilakukan secara non penal dan penal. Upaya penegakan hukum secara non penal dilakukan oleh Polres Batanghari dengan cara melakukan penangkapan terhadap calo CPNS yang diduga melakukan penipuan, melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap saksi dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penipuan, mengumpulkan barang bukti dan melakukan mediasi untuk mencari keputusan dari tahap penyidikan. Namun seluruh korban tindak pidana penipuan oleh calo CPNS ini memilih untuk menyelesaikan perkara sampai tahap putusan pengadilan. Selanjutnya upaya penegakan hukum secara penal dengan cara memberikan sanksi pidana melalui putusan pengadilan, dimana dari 2 kasus yang terjadi maka 1 orang calo CPNS mendapat hukuman pidana 3 tahun dan 1 orang calo CPNS mendapat hukuman 4 tahun pidana penjara. Kendala dalam penegakan hukum terhadap calo CPNS yang melakukan tindak pidana penipuan di Polres Batanghari adalah ketidak hadiran saksi korban apabila pemanggilan dari pihak kepolisian, pelapor yang tidak melanjutkan proses penyidikan, bukti dan saksi-saksi dari pelapor yang belum lengkap, rumitnya prosedur dari instansi pemerintah untuk memberikan izin kepada saksi, serta kesadaran masyarakat yang mudah terbujuk oleh tindakan calo CPNS dan masyarakat yang sudah merasa dirugikan juga tidak memiliki kesadaran untuk melaporkan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh calo CPNS kepada Polres Batanghari.

The objectives of this research are 1) to determine and analyze law enforcement efforts against CPNS brokers who commit criminal acts of fraud; and 2) obstacles in law enforcement against CPNS brokers who commit criminal acts of fraud at the Batanghari Police. The type of research is empirical juridical. The results of the research show that law enforcement efforts against CPNS brokers who commit criminal acts of fraud at the Batanghari Police are carried out in a non-penal manner by the Batanghari Police by arresting CPNS brokers, conducting investigations and examining witnesses and parties involved in fraud cases, collect evidence. Furthermore, efforts to enforce the law in a penal manner by providing criminal sanctions through court decisions, where of the 2 cases that occurred, 1 CPNS broker received a criminal sentence of 3 years and 1 CPNS broker received a 4 year prison sentence. Obstacles in law enforcement against CPNS brokers who commit criminal acts of fraud at the Batanghari Police are the absence of witnesses, the reporter not continuing the investigation process, incomplete evidence and witnesses from the reporter, complicated procedures for government agencies to give permission to witnesses, and public awareness that is easily persuaded by the actions of CPNS brokers

Kata Kunci: penegakan hukum, calo CPNS